

## **PENGARUH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI PROVINSI PAPUA**

**Richardo Bano<sup>1</sup>,  
I Wayan Sukadana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: richardobano@gmail.com

### **ABSTRAK**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tidak merata masih meninggalkan permasalahan yang harus dihadapi di dalam pembangunan suatu daerah. Provinsi Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan tersebut dapat menjadi hambatan dalam pemerataan ekonomi di setiap wilayah yang ada dan akan berdampak pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh program pemberdayaan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, dan program pemberdayaan sosial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua. Data yang digunakan dari tahun 2016 – 2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan secara simultan program pemberdayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan sosial secara simultan tidak mempunyai pengaruh nyata dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hal ini juga berdampak kepada masi tingginya kemiskinan di tanah Papua, berdasarkan hasil analisis di temukan bahwa program-program tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Papua.

**Kata kunci :** program pemberdayaan infrastruktur, program pemberdayaan ekonomi, program pemberdayaan sosial, pengeluaran konsumsi rumah tangga

### **ABSTRACT**

*Uneven household consumption expenditure still leaves problems that must be faced in the development of an area. Papua Province consisting of 29 districts / cities has a background of differences between regions. Such differences can be an obstacle in economic equality in each region and will have an impact on household consumption expenditures. The purpose of this research is to determine the influence of infrastructure empowerment programs, economic empowerment programs, and social empowerment programs on household consumption expenditures. This research was conducted in every district / city in papua province. Data used from 2016 – 2017. Data analysis techniques used are descriptive analysis techniques and multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis found simultaneously infrastructure empowerment programs, economic empowerment and social empowerment simultaneously have no real and significant influence on household consumption expenditures. This also has an impact on the high level of poverty on Papuan soil, based on the results of the analysis found that these programs do not have a significant influence on poverty in Papua.*

**Keywords:** *infrastructure empowerment programs, economic empowerment programs, social empowerment programs, household consumption expenditures*

## **PENDAHULUAN**

Tujuan suatu bangsa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang. Ada dua jenis pembangunan yang dilakukan pemerintah yaitu pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Pada umumnya, pembangunan nasional dan pembangunan daerah di negara-negara berkembang seperti Indonesia lebih dititik beratkan pada pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pada negara berkembang, yang dirasakan adalah keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan-perubahan dalam masyarakat. Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Nantinya diharapkan semua potensi perekonomian yang dimiliki masyarakat mampu dikembangkan untuk menanggulangi kemiskinan disamping memacu pertumbuhan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

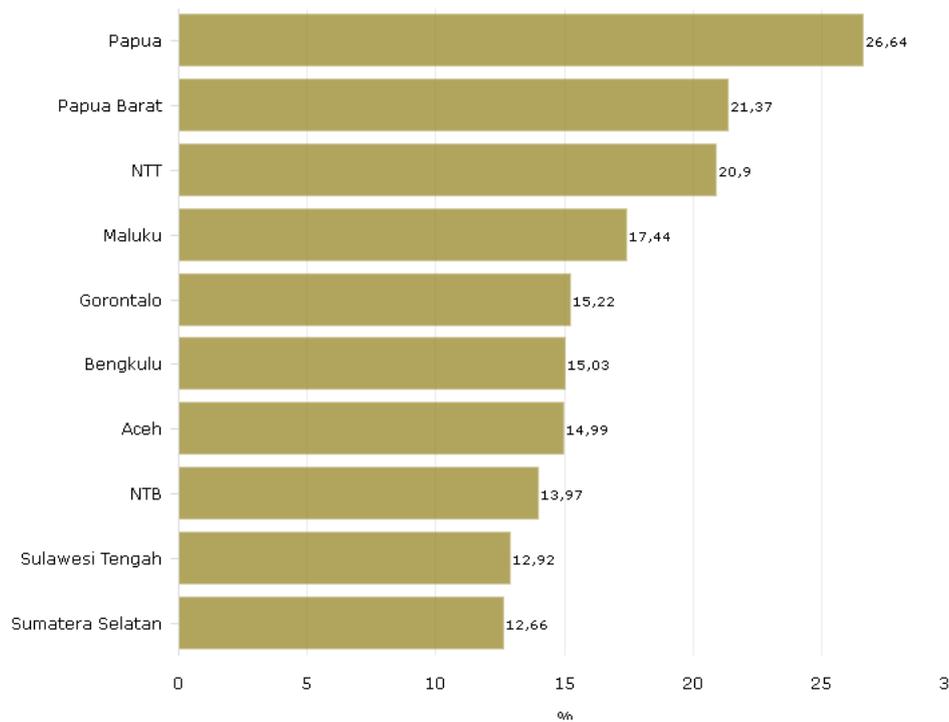
Kemiskinan merupakan masalah yang hingga saat ini masih sulit untuk di selesaikan. Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Kemiskinan telah menjadi perhatian utama dalam perkembangan kebijakan sosial (Alcock, 2012). Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kemiskinan (Vincent, 2009). Kemiskinan juga dapat diartikan

sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap system yang diterapkan oleh suatu pemerintahan sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplorasi (kemiskinan struktural).

Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebab dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta tingkat pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi (Santosa, 2003).

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana (2009) yaitu, 1). Pendidikan yang terlampau rendah, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. 2). Malas Bekerja, adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. 3). Terbatasnya Lapangan Kerja, keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil

kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan ketrampilan, sehingga berpengaruh pada pendapatan. Adapun data tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



**Gambar 1.**  
**Daftar Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia Periode**  
**Maret 2020**

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Berlandaskan data pada Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi adalah Provinsi Papua. Papua memiliki tingkat kemiskinan sebesar 26,64%, sehingga menarik untuk melakukan penelitian pada Provinsi Papua. Provinsi Papua merupakan salah satu daerah dengan sumber daya alam yang sangat kaya. Sumber daya alam yang kaya ternyata tidak menjadi suatu jaminan bahwa daerah tersebut akan terhindar dari kemiskinan. Adanya tambang emas dan minyak di Papua

ternyata tidak berdampak dalam mengurangi kemiskinan di Papua. Papua dengan banyaknya sumber daya alam ternyata tidak menjadi jaminan bahwa akan terhindar dari masalah kemiskinan.

Dengan melihat masih banyaknya penduduk miskin yang tersebar diberbagai wilayah di Papua, dengan kata lain pembangunan yang dilakukan di Papua dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Adapun data Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita di Indonesia selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa provinsi di Indonesia yang memiliki rata rata konsumsi protein per kapita per hari paling rendah selama 2015-2019 adalah provinsi Papua yakni dengan jumlah konsumsi protein sebanyak 44,66 gram per hari, kemudian apabila ditinjau dari rata rata konsumsi kalori per kapita per hari paling selama 2015-2019, provinsi Papua menempati posisi ketiga terendah. Data memberikan informasi bahwa selama tahun 2019 rata-rata konsumsi kalori per hari di Papua adalah 1.863,07 kkal, yaitu berada dibawah patokan kecukupan konsumsi kalori yang ditetapkan di Indonesia sebanyak 2100 kalori. Kondisi ini

mencerminkan Provinsi Papua memiliki tingkat konsumsi rumah tangga paling rendah di Indonesia.

**Tabel 1.**  
**Rata-Rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) per Kapita terendah di Indonesia selama tahun 2015-2019**

No	Provinsi	Rata-Rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari Menurut Provinsi, 2015-2019					Rata-Rata Selama 5 tahun terakhir
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Maluku Utara	1688.34	1720.41	1783.27	1820.23	1765.13	1755.48
2	Maluku	1760.56	1837.22	1886.52	1780.90	1782.61	1809.56
<b>3</b>	<b>Papua</b>	<b>1807.66</b>	<b>1764.80</b>	<b>1924.39</b>	<b>1842.23</b>	<b>1863.07</b>	<b>1840.43</b>
4	Papua Barat	1832.98	1828.53	1875.44	1944.26	1922.27	1880.70
5	Kalimantan Utara	1720.20	1831.17	1977.32	1973.97	2006.92	1901.92
6	Nusa Tenggara Timur	1775.22	1889.63	2031.60	1956.37	1916.72	1913.91
7	Kalimantan Barat	1935.91	1955.17	1960.58	1924.96	1912.03	1937.73
8	Kalimantan Timur	1868.19	1909.87	1997.46	1998.36	2022.32	1959.24
9	Jawa Tengah	1936.26	1964.01	2080.76	2106.67	2045.63	2026.67
10	Lampung	1933.47	1952.08	2150.83	2082.31	2050.79	2033.90

No	Provinsi	Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita per Hari Menurut Provinsi, 2015-2019					Rata-Rata Selama 5 tahun terakhir
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	<b>Papua</b>	<b>39.48</b>	<b>38.40</b>	<b>46.03</b>	<b>44.04</b>	<b>44.66</b>	<b>1755.48</b>
2	Maluku Utara	45.13	46.57	49.77	49.17	48.43	1809.56
<b>3</b>	Maluku	47.60	50.07	53.90	50.21	50.69	1840.43
4	Nusa Tenggara Timur	46.27	49.40	55.92	53.40	53.78	1880.70
5	Papua Barat	49.69	50.00	53.20	56.48	56.60	1901.92
6	Kalimantan Barat	51.95	52.79	56.16	55.66	55.82	1913.91
7	Lampung	50.35	51.15	58.57	56.29	57.30	1937.73
8	Jambi	51.31	51.89	57.18	57.73	57.83	1959.24
9	Sulawesi Barat	53.07	55.91	55.41	55.08	58.79	2026.67
10	Sulawesi Tengah	53.36	53.36	59.63	57.90	57.09	2033.90

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa provinsi di Indonesia yang memiliki rata rata konsumsi protein per kapita per hari paling rendah selama 2015-2019 adalah provinsi Papua yakni dengan jumlah konsumsi protein sebanyak 44,66 gram per hari, kemudian apabila ditinjau dari rata rata konsumsi kalori per kapita per hari

paling selama 2015-2019, provinsi Papua menempati posisi ketiga terendah. Data memberikan informasi bahwa selama tahun 2019 rata-rata konsumsi kalori per hari di Papua adalah 1.863,07 kkal, yaitu berada dibawah patokan kecukupan konsumsi kalori yang ditetapkan di Indonesia sebanyak 2100 kalori. Kondisi ini mencerminkan Provinsi Papua memiliki tingkat konsumsi rumah tangga paling rendah di Indonesia.

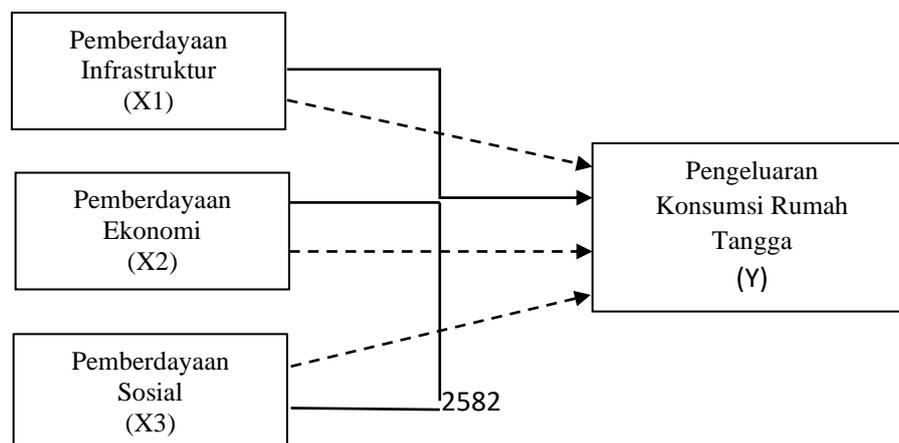
Upaya pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Papua yakni dengan cara melakukan berbagai macam pemberdayaan atau pembangunan. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pada Provinsi Papua diantaranya adalah program pemberdayaan infrastruktur, program pemberdayaan perekonomian, dan program pemberdayaan sosial. Program pemberdayaan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah pembangunan jalan raya Trans Papua. Program pemberdayaan perekonomian yang dilakukan pemerintah pada Provinsi Papua menurut data Badan Pusat Statistik adalah meningkatkan pembangunan pasar, meningkatkan penginapan/hotel, dan meningkatkan pembangunan koperasi. Selanjutnya program pemberdayaan sosial yang dilakukan adalah meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar seperti meningkatkan pembangunan sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Adanya program pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pendapatan yang meningkat tentu daya beli masyarakat juga meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi pertama-tama ditentukan oleh tingkat pendapatan. Beberapa teori mengenai pengeluaran konsumsi menyebutkan bahwa untuk memperoleh kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi satu atau beberapa barang sangat dibatasi oleh pendapatan. Semakin tinggi penghasilan rumah tangga semakin banyak pula kebutuhan yang akan mereka penuhi. Penelitian yang berkaitan dengan korelasi antara pola konsumsi dan pendapatan keluarga sudah cukup sering dilakukan. Salah satu teori yang berhubungan dengan itu diantaranya adalah Hipotesis Pendapatan Absolut yang menyebutkan semakin tinggi pendapatan suatu keluarga, maka pengeluaran untuk konsumsi akan tinggi. Masih banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi tingkat konsumsi yaitu anggota keluarga, pola konsumsi, tingkat pendidikan dan pendapatan keluarga. Salah satu teori yang berhubungan dengan itu diantaranya adalah Hipotesis Pendapatan Absolut yang menyebutkan semakin tinggi pendapatan suatu keluarga, maka pengeluaran untuk konsumsi akan semakin tinggi.

Berlandaskan pada penelitian Etavianti (2014) menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah diharapkan terus menggerakkan sektor-sektor produktif, memperluas lapangan kerja dan menciptakan iklim berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Fidayetti dan Ardianto (2011) juga menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga diantaranya terdiri dari faktor ekonomi (seperti pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga dan tingkat bunga), faktor demografi atau

kependudukan, dan faktor non ekonomi (seperti faktor sosial-budaya masyarakat). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan perekonomian dan pemberdayaan sosial dari pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Penelitian serupa oleh Badriyah (2016) juga menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga bukan hanya dapat dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, namun juga dipengaruhi pembangunan sosial. Selanjutnya pada penelitian Arniana (2017) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi dapat mendorong laju pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Padli dkk (2020) menemukan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten (*research gap*) dan fenomena masalah yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh program pemberdayaan infrastruktur, perekonomian dan sosial dari pemerintah terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Papua. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini seperti yang disajikan pada Gambar 2 berikut:



**Gambar 2.**  
**Kerangka Konseptual**

*Sumber* : Hasil pemikiran peneliti, 2021

Berdasarkan kerangka konsep penelitian dan pokok permasalahan maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H<sub>1</sub> : Program Pemberdayaan Insfrakstruktur, Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Sosial secara parsial berpengaruh positif terhadap terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Papua.

H<sub>2</sub> : Program Pemberdayaan Insfrakstruktur, Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Sosial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Papua

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang akan dijelaskan secara asosiatif. Penelitian ini di lakukan di Provinsi Papua karena Provinsi Papua merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi di Indonesia serta hampir semua kabupaten dan kota mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak. Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Papua tentu akan berdambak terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Selain itu tingkat konsumsi rumah tangga di papua masih dibawah standar konsumsi yang ditentukan Pemerintah, yakni berada dibawah 2100 kkal, dan menduduki peringkat tiga konsumsi paling rendah di Indonesia.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat atau *dependent variable* adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (Y). Pengeluaran Konsumsi Rumah

tangga dalam penelitian ini dicerminkan dari besarnya tingkat konsumsi rumah tangga menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua. Variabel bebas atau *independent variable* dalam penelitian ini adalah Program pemberdayaan infrastruktur ( $X_1$ ), Program pemberdayaan perekonomian ( $X_2$ ) dan Program pemberdayaan sosial ( $X_3$ ). Pemberdayaan infrastruktur dalam penelitian ini dicerminkan dari banyaknya program pembangunan infrastruktur menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua. Pemberdayaan ekonomi dalam penelitian ini dicerminkan dari banyaknya program pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua. Pemberdayaan sosial dalam penelitian ini dicerminkan dari banyaknya program pembangunan sosial menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan meliputi data Peranan PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 – 2017 (persen), Dana Desa Bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (AAD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota, data tentang Konsumsi dan data kemiskinan menggunakan rasio Gini. Dalam penelitian ini, data kualitatif yang digunakan meliputi data jurnal-jurnal pendukung terkait variabel yang diteliti, data hasil wawancara dengan pengusaha kerajinan tenun dan gambaran umum Papua, seperti gambaran umum geografis wilayah provinsi Papua, gambaran umum pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDRB Provinsi Papua.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, serta mempelajari uraian dari buku-buku, artikel, karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti

Badan Pusat Statistik, browsing melalui website dan buku-buku literatur tentang program pemberdayaan infrastruktur, ekonomi, dan sosial terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Pengeluaran konsumsi menjadi komponen utama dari Produk Nasional Bruto, karena itu perhatian utama perlu diperhatikan dan diputuskan pada analisis faktor yang menentukan pengeluaran konsumsi. Khusus untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga, ada faktor yang paling menentukan diantaranya yaitu tingkat pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga atau masyarakat secara keseluruhan maka akan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. (Masagus, 2007:5)

Menurut Friedman dan Modigliani, bahwa setiap individu akan memperoleh kepuasan yang lebih tinggi apabila mereka dapat mempertahankan pola konsumsi yang stabil daripada kalau harus mengalami kenaikan dan penurunan dalam konsumsi mereka. Tetapi Modigliani melanjutkan dengan menyatakan bahwa orang akan berusaha menstabilkan tingkat konsumsi mereka sepanjang hidupnya dan juga menganggap penting peranan kekayaan atau aset sebagai penentu tingkah laku konsumsi.

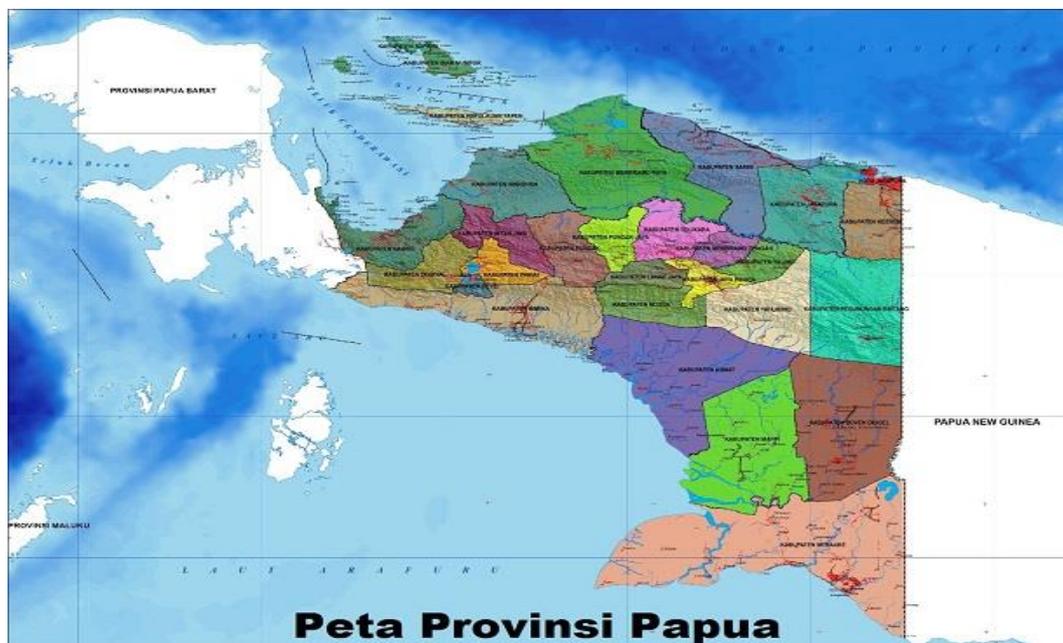
Seseorang atau suatu rumah tangga akan terus menambah proporsi konsumsi makanannya sebanding dengan tingkat penambahan dari penghasilan

yang di terimanya sampai batas tertentu, penambahan pendapatan tidak lagi menyebabkan bertambahnya jumlah makanan yang dikonsumsi karena pada dasarnya kebutuhan manusia akan makanan mempunyai titik jenuh. Sehingga terdapat kecendrungan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin berkurang presentase pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan. Oleh karena itu, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dengan asumsi bahwa penurunan presentasi pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran merupakan gambaran membaiknya tingkat perekonomian penduduk (Dian,2007:3). Besarnya tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat tersebut, artinya makin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, berarti makin tinggi pula tingkat kemakmurannya.

Pendapatan seseorang merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan kegiatan konsumsi, dikarenakan konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan. Semakin tinggi penghasilan yang diterima seseorang maka akan cenderung semakin besar pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi. Demikian juga dengan perilaku tabungan, apabila pendapatan seseorang meningkat, baik untuk konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah, akan tetapi berlaku pada masyarakat dengan kehidupan ekonomi yang relatif sudah aman. Laju pertumbuhan ekonomi yang berubah dari tahun ke tahun berpengaruh pula terhadap terhadap pengeluaran konsumsi yang akan dilakukan oleh masyarakat serta perkembangan teknologi yang demikian pesat juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku masyarakat dalam berkonsumsi.

Papua adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur Papua bagian barat. Belahan timurnya merupakan negara Papua Nuigini. Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat, namun sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap menggunakan nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Pulau Papua mempunyai luas 808.105 km persegi dan merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama di Indonesia. Papua sebelah Utara : Samudera Pasifik, Selatan: Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia, Barat: Papua Barat, Kepulauan Maluku, dan Timur : Papua Nuigini. Berikut ini adalah peta dari Provinsi Papua.

**Gambar 4.1 Peta Provinsi Papua**



Sumber : Peta Provinsi Papua, <https://papua.go.id>

Provinsi Papua memiliki luas area sekitar 421,981 kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,5 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit di tembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi dengan salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan.

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan colonial Hindia Belanda. Wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda. Setelah bergabung dengan negara Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan nama Irian Jaya di ganti menjadi Papua.

Secara administrative Provinsi Papua terbagi dalam 29 wilayah pemerintahan, dengan 28 kabupaten dan 1 kota dengan 470 kecamatan dan 4.375 desa/kelurahan.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2017**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa</b>
<b>Merauke</b>	20	168
<b>Jayawijaya</b>	37	312
<b>Jayapura</b>	19	144
<b>Nabire</b>	15	85
<b>Kepulauan Yapen</b>	14	145

<b>Biak Numfor</b>	19	262
<b>Paniai</b>	10	70
<b>Puncak Jaya</b>	26	302
<b>Mimika</b>	12	86
<b>Boven Digoel</b>	20	112
<b>Mappi</b>	15	162
<b>Asmat</b>	19	211
<b>Yahukimo</b>	51	518
<b>Pegunungan Bintang</b>	34	277
<b>Tolikara</b>	48	549
<b>Sarmi</b>	18	102
<b>Keerom</b>	7	61
<b>Waropen</b>	10	108
<b>Supiori</b>	5	38
<b>Mamberamo Raya</b>	9	59
<b>Nduga</b>	8	32
<b>Lanny Jaya</b>	10	143
<b>Mamberamo Tengah</b>	5	59
<b>Yalimo</b>	5	27
<b>Puncak</b>	8	80
<b>Dogiyai</b>	10	79
<b>Intan Jaya</b>	6	78
<b>Deiyai</b>	5	67
<b>Kota Jayapura</b>	5	39

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa dari 29 Kabupaten/Kota paling banyak 506 desa menerima dana bersumber dari APBN ( $X_1$ ) dan paling sedikit 14 desa. Variabel alokasi dana desa ( $X_2$ ) yaitu sebanyak 302 desa yang menerima alokasi dana desa dan ada desa yang sama sekali tidak menerima alokasi dana desa. Variabel bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) rata-ratanya (mean) sebanyak 59 desa. Maximal ada 488 desa yang menerima bantuan keuangan dari APBD provinsi.

Variabel bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota ( $X_4$ ) adalah sebanyak 129 desa telah menerima bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. Variabel konsumsi ( $Y$ ) rata-ratanya (mean) sebesar 62,5 dengan

standar deviasi 7,561883. Jumlah konsumsi tertinggi yaitu 76,23 dan terendah 44,63. Variabel Gini Rasio (Y) rata-ratanya (*mean*) sebesar 0,302069 dengan standar deviasi sebesar 0,0705276. Gini rasio tertinggi yaitu 0,46 dan terendah 0,18.

Hasil estimasi program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan keuangan dari APBD Kab/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi, alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari APBN terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R square* adalah sebesar 0,0109 ini berarti pengaruh variabel Bantuan Keuangan Dari APBD Kab/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari APBN terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,09 persen sedangkan sisanya sebesar 98,91 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Hasil juga menunjukkan  $F_{hitung}$  sebesar 1,08 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 2,78 maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ), alokasi dana desa ( $X_2$ ) dan bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ ) tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Besarnya nilai koefisien regresi dari variabel bebas dana desa bersumber dari APBN, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota, konstanta dan variabel terikat (pengeluaran konsumsi rumah tangga), maka diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = 60,7242 + 0,0204811X_1 + 0,0028437X_2 - 0,0090244X_3 - 0,0627119X_4$$

Nilai  $\beta_1 = 0,0204811$  artinya apabila alokasi dana desa ( $X_2$ ), bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ), bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ )

dianggap konstan maka meningkatnya dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ) disetiap Kabupaten dan Kota akan meningkatkan konsumsi ( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,0204811 persen. Peningkatan konsumsi sebesar 0,0204811 persendisebabkan karena sebanyak 5.179 desa mendapatkan dana desa bersumberdari APBN dari total 5.411 desa yang ada di Provinsi Papua. Artinyahanya 232 desa yang belum mendapatkan dana desa bersumber dari APBN. Nilai  $\beta_2 = 0,002843$  artinya apabila dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ), bantuankeuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) dan bantuan keuangan dari APBD per Kab/Kota ( $X_4$ ) dianggap konstan maka meningkatnya alokasi dana desa (ADD) disetiap Kabupaten dan Kota akan meningkatkan Konsumsi ( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,002843 persen. Peningkatan konsumsi oleh alokasi dana desa lebih kecil yaitu 0,002843 persen dibandingkan dengan dana desa bersumber dari ABPN.Hal ini disebabkan karena dari total 5.411 desa yang ada hanya 2.773 desa yang mendapatkan alokasi dana desa dari Pemerintah.

Nilai  $\beta_3 = 0,0090244$  artinya apabila dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ), alokasi dana desa ( $X_2$ ) dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ ) dianggap konstan maka meningkatnya bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh menurunnya konsumsi ( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,0090244 persen. Penurunan konsumsi sebesar 0,0090244 persen diakibatkan oleh menurunnya bantuan keuangan dari APBD Provinsi kepada tiap-tiap desa, dimana hanya 1.724 desa yang mendapat bantuan APBD Provinsi dari total 5.441 desa yang ada. Pemerintah provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung membenarkan, sekitar Rp.1,1 triliun dari total Rp.4,3 triliun

dana desa 2017 yang di alokasikan bagi provinsi Papua, mesti dikembalikan ke kas daerah karena tak bisa di serap.

Nilai  $\beta_4 = 0,0627119$  artinya apabila dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ), alokasi dana desa ( $X_2$ ) dan bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) dianggap konstan maka meningkatnya bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ ) di setiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh penurunan konsumsi ( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,0627119 persen. Penurunan konsumsi sebesar 0,0627119 diakibatkan oleh menurunnya bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota kepada tiap-tiap desa, dimana hanya 749 desa yang mendapat bantuan Pemerintah sedangkan 4.662 tidak mendapatkan bantuan. Menurut Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Papua menyebutkan realisasi penyaluran dana desa tahun 2017 di Provinsi Papua, hanya lima Kabupaten yang tersalur 100 persen dari 29 Kabupaten yang ada.

Hasil estimasi pemberdayaan ekonomi melalui bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Bersumber dari APBN terhadap gini rasio menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R square* adalah sebesar -0,0176 ini berarti pengaruh variabel bantuan keuangan dari APBD Kab/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari APBN terhadap rasio gini sebesar -0,0176 sedangkan sisanya sebesar 0,9824 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Dari hasil yang di peroleh maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,2892868 - 0,0000684X_1 - 0,0000249X_2 + 0,00002583X_3 + 0,00004659X_4$$

Nilai  $\beta_1 = 0,0000684$  artinya apabila apabila alokasi dana desa ( $X_2$ ), bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ), bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ ) dianggap konstan maka meningkatnya dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ) disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh menurunnya gini rasio ( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,0000684. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua pada periode September 2016 hingga maret 2018 terus berfluktuasi secara tidak signifikan dan mencapai angka 0,384 pada maret 2018. Nilai  $\beta_2 = 0,0000249$  artinya apabila dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ), bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ ) dianggap konstan maka meningkatnya alokasi dana desa ( $X_2$ ) disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh menurunnya gini rasio ( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,0000249. Menurut data BPS Papua untuk daerah perdesaan, gini rasio pada maret 2018 tercatat sebesar 0,384, turun 0,023 poin dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 0,407 dan menurun sebesar 0,011 poin dari maret 2017 yang sebesar 0,395.

Nilai  $\beta_3 = 0,0002583$  artinya apabila dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ), alokasi dana desa ( $X_2$ ) dan bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ ) dianggap konstan maka meningkatnya bantuan keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh meningkatnya gini rasio ( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,00002583. Naiknya angka rasio gini sebesar 0,00002583 poin disetiap Kabupaten/Kota disebabkan oleh tidak tersalurnya bantuan keuangan dari APBD Provinsi secara merata di setiap desa yang ada. Nilai  $\beta_4 = 0,00004659$  artinya apabila dana desa bersumber dari APBN ( $X_1$ ), alokasi dana desa ( $X_2$ ) dan bantuan

keuangan dari APBD provinsi ( $X_3$ ) dianggap konstan maka meningkatnya bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota ( $X_4$ ) disetiap Kabupaten/Kota akan diikuti oleh meningkatnya gini rasio( $Y$ ) rata-rata sebesar 0,00004659. Naiknya angka gini rasio sebesar 0,00004659 poin disetiap Kabupaten/Kota disebabkan oleh tidak tersalurnya bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota secara merata di setiapdesayang ada.

Hasil estimasi pemberdayaan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan sosial terhadap *difference* konsumsi tahun 2016 – 2017 menunjukkan bahwa besarnya nilai *adjusted r square* adalah sebesar -0.0143 ini berarti pengaruh variabel pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan sosial terhadap *difference* konsumsi sebesar -1,43 persen sedangkan sisanyasebesar 98,57 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Nilai  $F_{hitung}$  sebesar 0,80 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 3,37 maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan sosial tidak berpengaruh secara simultan terhadap *difference* konsumsi. Dari hasil yang diperoleh maka didapat persamaan regresi berikut:

$$Y = 1,648615 + 0,0980506X_1 - 0,0958995X_2$$

Nilai  $\beta_1 = 0,0980506$  artinya apabila apabila Pemberdayaan ( $X_2$ ) dianggap konstan maka meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana ( $X_1$ ) disetiap Kabupaten dan Kota ( $Y$ ), maka akan diikuti oleh meningkatnya selisih konsumsi sebesar 0,0980506 persen. Meningkatnya *difference* konsumsi rata-rata sebesar 0,0980506 disebabkan oleh pembangunan sarana dan prasarana yang sudahmulai membaik di setiap Kabupaten dan hanya 8 Kabupaten yangmengalami penurunan

konsumsi dari 29 Kabupaten/Kota. Nilai  $\beta_2 = 0,0958995$  artinya apabila apabila Pembangunan Sarana dan Prasarana ( $X_1$ ) dianggap konstan maka meningkatnya Pemberdayaan ( $X_2$ ) disetiap Kabupaten dan Kota (Y), maka akan diikuti oleh menurunnya *difference* konsumsi sebesar 0,0958995 persen. Menurunnya *difference* konsumsi rata-rata sebesar 0,0958995 diakibatkan oleh program pemberdayaan yang masi belum tersalurkan secara merata disetiap kampung.

Hasil estimasi pemberdayaan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan sosial terhadap *difference* kemiskinan tahun 2016 – 2017 menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R square* adalah sebesar 0,0716 ini berarti pengaruh variabel Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan sosial terhadap *difference* kemiskinan sebesar 7,16 persen sedangkan sisanyasebesar 92,84 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Hasil menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 2,08 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 3,37 maka  $H_0$  diterima yang berarti bahwa variabel Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan sosial tidak berpengaruh secara simultan terhadap *difference* kemiskinan. Dari hasil yang diperoleh maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,4253401 - 0,0094449X_1 + 0,0079983X_2$$

Nilai  $\beta_1 = 0,0094449$  artinya apabila apabila Pemberdayaan ( $X_2$ ) dianggap konstan maka meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana ( $X_1$ ) disetiap Kabupaten dan Kota (Y), maka akan diikuti oleh menurunnya *difference* kemiskinan sebesar 0,0094449 persen. Namun, Hasil Survei SosialEkonomi Nasional (Susenas) pada maret 2018 menunjukan jumlah penduduk miskin di Papua

sebesar 917,63 ribu orang, meningkat bila dibandingkan kondisi pada maret 2017 sebesar 897,69 ribu orang. Nilai  $\beta_2 = 0,0079983$  artinya apabila Pembangunan Sarana dan Prasarana( $X_1$ ) dianggap konstan maka meningkatnya Pemberdayaan ( $X_2$ ) di setiap Kabupaten dan Kota (Y), maka akan diikuti oleh meningkatnya *difference* kemiskinan sebesar 0,0079983 persen. Fenomena kemiskinan di Papua adalah tingginya disparitas antara kota dan pedalaman hal ini dikarenakan wilayah pedalaman di Papua sangat minim infrastruktur baik pendidikan maupun kesehatan.

Hasil analisis dalam penelitian ini mendukung hasil penelitian Etavianti (2014) yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi secara signifikan oleh pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah diharapkan terus menggerakkan sektor-sektor produktif, memperluas lapangan kerja dan menciptakan iklim berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi masyarakat. Fidayetti dan Ardianto (2011) juga menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga diantaranya terdiri dari faktor ekonomi (seperti pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga dan tingkat bunga), faktor demografi atau kependudukan, dan faktor non ekonomi (seperti faktor sosial-budaya masyarakat). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemberdayaan perekonomian dan pemberdayaan sosial dari pemerintah dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Penelitian serupa oleh Badriyah (2016) juga menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga bukan hanya dapat dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, namun juga

dipengaruhi pembangunan sosial. Selanjutnya pada penelitian Arniana (2017) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi dapat mendorong laju pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Edward (2019), Peter (2020), dan Rosengard (2020) yang menyatakan bahwa ada pengaruh program pemberdayaan masyarakat terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui bantuan keuangan dari APBD Kab/kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari APBN secara simultan tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui bantuan keuangan dari APBD Kab/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi, alokasi dana desa dan dana desa bersumber dari APBN secara simultan tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap gini rasio. Pemberdayaan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan sosial secara simultan tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap *difference* konsumsitahun 2016 – 2017. Hasil estimasi pemberdayaan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan sosial secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap *difference* kemiskinan tahun 2016 – 2017

Berdasarkan hasil analisis disarankan kepada pemerintah provinsi Papua agar memperhatikan peningkatan pemerataan distribusi pendapatan dan menetapkan kebijakan sehingga mampu menekan kemiskinan dan tercipta pemerataan distribusi pendapatan di setiap Kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kemudian disarankan kepada pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk memaksimalkan pengalokasian anggaran untuk kepentingan belanja pembangunan dibandingkan belanja rutin dan pengalokasiannya harus diawasi sehingga tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur penunjang komponen kesejahteraan.

## REFERENSI

- Blank Rebecca M. 2000. Distinguished Lecture on Economics in Government: Fighting Poverty: Lessons from Recent U.S. History. *Journal of Economics Perspective*. Vol. 14, No. 2. Pp : 3-19.
- Cahya, Ni Kadek Kartini Dwi. 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 6, No.4.
- Dariwardani Ni Made Inna. 2014. Analisis Dinamika Kemiskinan (Poverty Dynamics) di Bali Berdasarkan Data Susenas 2008-2010. *Journal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 7, No.1. pp: 7-15
- Desta Chalachew Getahun. 2014. Fertility And Household Consumption Expenditure In Ethiopia: A Study In The Amhara Region. *Journal Of Population And Social Studies*. Vol 22, No.2. pp: 202-218
- Dash and Sahoo. 2009. Infrastructure Development and Economic Growth in India. *Journal of the Asia Pacific Economy*. Vol 14, No.4. pp: 351-365
- Edward Aspinall & Marcus Mietzner, 2019. Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies Journals*, vol. 55(3), pages 295-317

- Ekawati Natalia Niken, Abdul Hakim and Irwan Noor. 2016. Influence Of People Participation In The Implementation Of Community Empowerment Program. *Journal of Business and Management*. Vol 18, Issue.4. pp : 23-26.
- Elena, Mikhail, Andrey, Olga and Kabanova. 2016. Influence Of People Participation In The Implementation Of Community Empowerment Program. *Journal Of Business and Management*. Vol 18, issue.4. pp: 23-26
- Emalia Sulfa. 2013. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 6, No.1, pp: 45-54
- Hadiyanti Puji. 2016. A Group Approach in a Community Empowerment: A Case Study of Waste Recycling Group in Jakarta. *Journal of Education and Praticce*. Vol.7 , No.29.
- Hauwaa Buba Jajere. 2016. Impact of Unemployment of Economic Growth inNigeria 1980-2010. *Pyrex Journal of Businesss and Finance ManagementResearch*. Vol 2, No.10.pp: 180-195
- Handayani, M. Th, Artini Ni Wayan Putu. 2009. Kontribusi Pendapatan IbuRumah Tangga Pembuat Makanan Olahan Terhadap Pendapatan Keluarga. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan SumberdayaManusia*. Vol V, No.1.
- Husna dan Yudhistira. 2017. Studi Empirik Interaksi Strategis Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 10, No.2. pp: 113-124
- Ida Ayu Andika Rasmonta Dewi. 2011. Efektivitas dan Dampak Program Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin Melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan sosial (P2FM-BLPS) Dengan Pendekatan Kelompok Usaha Bersama Terhadap Tingkat Pendapatan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tabanan.
- Iek Mesak. 2013. Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap PertumbuhanUsaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat(Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). *Jurnal EkonomiKuantitatif Terapan*. Vol.6, No.1

- Juliantri, Ni Komang Tari. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas dan Pendapatan Petani Pada Pelaksanaan SIMANTRI di Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 7, No.4.
- Jonaidi, Arius. 2012. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*. Vol. 1, No.1.
- Junli and Lihua. 2014. Roles of Government Coordinated Regional Development in China. *International Journal of Business and Social Science*. Vol 5, No 6.
- Kemenuh, Ida Bagus Adi Mahaputra. 2017. Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Terhadap Pendapatan Keluarga KK Miskin. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 6, No.9.
- Kurniawati, Dwi Pratiwi. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1 , No.4.
- Munandar, Aris. 2008. Peran Negara Dalam Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*. Vol. 4, No.1.
- Murdiansyah, Isnaini. 2014. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ekonomi*. Vol. 4, No.1.
- Masrukin, Ahmad Sabiq, Toto Sugito, Bambang Suswanto, and Adhi Iman Sulaiman. 2016. Community Empowerment Model through Cooperative for the Villages Most Severely Affected By Eruption of Merapi. *International Journal of Social Science and Humanity*. Vol. 6, No.1.
- Michael Baghebo Phd and Emmanuel Nathan Phd. 2015. The Impact of Poverty Alleviation Programmes on Economic Growth in Nigeria 1981 – 2013. *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol.5 , No.10.
- Masjid, Al-Shami, Mohamad and Rashid. 2017. Household Welfare and Women Empowerment through Microcredit Financing: Evidence From Malaysia Microcredit. *Journal of Human Behavior In The Social Environment*.
- Okonkwo Osmond N. 2015. Critical Review of Poverty Reduction Programme in Nigeria: Evidence from South-East Zone. *Journal of Economics and Finance*. Vol. 6, Issue 6. Pp: 32-43.

- Paramitha, A.A. Istri Diah. 2015. Pengaruh Investasi dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 4, No.10.
- Peter Warr. 2020. Urbanisation and the Demand for Food. *Bulletin of Indonesian Economic Studies Journals*, vol. 56(1), pages 43-86
- Rahmat. A and Izudin. A. 2018. Impact Evaluation of Community Empowerment Programs with the Farmer Managed Extension Model. *European Reserche Studies Journal*. Vol XXI. Issue 2. Pp : 225-235.
- Rimbawan Nyoman Dayu. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja (Kasus Provinsi Bali 2001-2011). *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Vol VIII.No.2.pp: 76-84
- Reinert Erik S. 1999. The Role of the State In Economic Growth. *Journal of Economic Studies*. Vol 26.No.45.
- Rizwan, Hogman and Amjad. 2017. Influencing Factors of Poverty in Pakistan:time Series Analysis. *International Journal of Economics and Financial*.Vol 7, No.2.
- Rosengard, J.K. 2020. The Creation of the East Timorese Economy, Volume 2: Birth of a Nation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies Journal*. Vol 56, No 2, pp: 254-256
- Suistyan, I Wayan Purdana Arya. 2017. Pengaruh Kapasitas dan Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Perajin Industri Kerajinan Sanggah di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*. Vol. 6, No.9.
- Swenson Carles. 2011. Government programs can improve local labor markets: Evidence from State Enterprise Zones, Federal Empowerment Zones and Federal Enterprise Community. *Journal of Public Economics*. Vol. 95, Issue 7-8. Pp:779-797.
- Sekhampu T.J and Niyimbanira F. 2013. Analysis Of The Factors Influencing Household Expenditure In A South African Township. *International Business and Economics Research Journal*. Vol. 12, Num 3.
- Sutiyo and Maharjan. 2011. Rural Poverty Alleviation In Indonesia: Programs And The Implementation Gap. *Journal of International Development and Cooperation*. Vol 18, No.1.pp: 13-22

- Set, Jhon and Dalhatu. 2018. The Impact of Unemployment on Economic Growth In Nigeria: An Application of Autoregressif Distributed Lag (ARDL) Bound Tasting. *Sumerians Journal of Business Management and Marketing*. Vol 1, No.2. pp: 33-46.
- Thenmolli and Kuppuasamy. 2013. Local Government and Community Development. *Journal International of Business, Economics and Law*. Vol.2.
- Vaidyanathan and Sundar. 2011. The Role of Public Sector Enterprises In Rural Development and Social Welfare. *International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies (IJMP ICT)*. Vol 2.No1.
- Williamson, Brendan and Richard. Public Service and Social Responsibility: A Role of Public Affairs in Undergraduate Business Education. *Journal of Public Affairs Education*. Vol 17, No.3. pp: 367-384
- Yasa I Komang Oka Artana. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 8, No.1.pp: 63-7